

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan lembaga negara yang memimpin pemerintahan di negara berkembang dan mempunyai kedudukan penting dan mutlak. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, pemerintah memegang peranan penting yaitu yang dari tiga fungsi pokok yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pengaturan berfungsi dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan atau menciptakan tatanan sosial yang baik dalam masyarakat. Fungsi pelayanan adalah fungsi pemerintahan yang menghasilkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan fungsi pemberdayaan merupakan fungsi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Melalui fungsi-fungsi pemerintahan itu ada fungsi pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan di mana anggota masyarakat mengambil inisiatif dalam memulai kegiatan sosial untuk meningkatkan kondisi dan situasi diri mereka. Proses ini hanya dapat terjadi jika seluruh masyarakat terlibat secara aktif. Ini merupakan proses yang bertujuan untuk mengaktifkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui upaya memandirikan mereka secara bertahap.

Pemilihan paradigma pemberdayaan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat memiliki makna yang signifikan dalam upaya menciptakan masa depan yang

lebih manusiawi. Memahami paradigma ini menjadi kunci dalam menentukan metode sosial, termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara baik untuk mencapai tujuan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan yang kreatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintahan dan pemberdayaan memiliki hubungan yang erat karena pemberdayaan sering kali merupakan tujuan yang dikejar oleh pemerintah dalam mengelola kebijakan dan program-programnya. Sedangkan korelasi antara pemberdayaan dan pemerintahan yang dilihat dalam aspek pemerintahannya adalah bahwa pemberdayaan yang baik sebenarnya dapat memperkuat legitimasi, stabilitas, efektivitas, inovasi dan kepemilikan masyarakat terhadap pemerintahannya. Ini juga yang merupakan dasar bagi pemerintahan yang lebih demokratis, responsive, dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi kemiskinan *extreme* dan *stunting* pada dasarnya melibatkan perubahan dalam perilaku, dimulai dari perubahan pola pikir individu dan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan *extreme* dan *stunting* hanya bisa terwujud melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka agar bisa mandiri, bersaing, dan berdiri sendiri dengan dukungan dari berbagai program pemberdayaan.

Stunting menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.

Stunting merupakan anak yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak seusianya yang terjadi karena kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan. Adapun standar ukuran pertumbuhan anak di Indonesia yang mengalami stunting tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak.

Standar *antropometri* anak diatur berdasarkan kategori status gizi dalam Standar Pertumbuhan Anak *World Health Organization* (WHO). Menurut standar ini, anak yang mengalami stunting terdeteksi pada ambang batas Z-Score antara <-2 SD hingga -3 SD (pendek/*stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek/*severely stunted*). Sementara itu, ukuran panjang atau tinggi badan anak yang dianggap normal untuk umurnya adalah berada dalam rentang -2 SD hingga $+3$ SD. Ukuran standar antropometri ini digunakan sebagai acuan untuk mengukur panjang atau tinggi badan anak dalam centimeter (cm).

Perlu dicatat bahwa standar tinggi badan untuk anak laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk mengetahui ukuran panjang atau tinggi badan anak yang mengalami stunting pada usia 1-5 tahun, dapat merujuk pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang menunjukkan ukuran standar antropometri anak. Tabel ini akan membantu dalam menilai apakah panjang atau tinggi badan anak sesuai dengan standar pertumbuhan yang normal atau menunjukkan indikasi stunting. Dengan membandingkan ukuran anak terhadap standar yang tertera, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan intervensi gizi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan optimal.

Tabel 1. 1
Standar Panjang Atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Laki-Laki
umur 1-5 Tahun

Umur (Tahun)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
	Tinggi Badan (cm)						
1	68.6	71.0	73.4	75.7	78.1	80.5	82.9
2	78.0	81.0	84.1	87.1	90.2	93.2	96.2
3	85.0	88.7	92.4	96.1	99.8	103.5	107.2
4	90.7	94.9	99.1	103.3	107.5	111.7	115.9
5	96.1	100.7	105.3	110.0	114.6	119.2	123.9

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Standar Antropometri Anak, diolah Mei 2024

Berdasarkan tabel diatas diatas dapat dilihat ukuran panjang atau tinggi badan anak laki-laki yang sudah disesuaikan berdasarkan ukuran tinggi badan centimeter (cm), jika panjang atau tinggi badan anak laki-laki pada tabel diatas yang sudah disesuaikan dalam ukuran centimeter (cm) kurang dari -2 SD sampai dengan 3 SD (*pendek/stunted*) dan kurang dari -3 SD (*sangat pendek/severely stunted*), maka anak tersebut mengalami stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Tabel berikut menyajikan data mengenai ukuran panjang atau tinggi badan anak laki-laki yang disesuaikan dalam centimeter (cm). Data ini didasarkan pada standar antropometri yang digunakan untuk mengidentifikasi stunting pada anak. Dengan menggunakan referensi Z-Score, tabel ini mengkategorikan panjang atau tinggi badan anak laki-laki dalam rentang Z-Score -2 SD hingga -3 SD (*pendek/stunted*) dan di bawah -3 SD (*sangat pendek/severely stunted*).

Melalui tabel ini, kita dapat mengevaluasi apakah panjang atau tinggi badan anak laki-laki sesuai dengan standar pertumbuhan yang normal atau menunjukkan tanda-tanda stunting. Ukuran yang berada dalam rentang Z-Score yang disebutkan

di atas mengindikasikan adanya kemungkinan stunting, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama. Dengan membandingkan ukuran anak dengan data yang tercantum, kita dapat menentukan kebutuhan intervensi gizi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat.

Tabel 1. 2
Standar Panjang Atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/ U) Anak
Perempuan umur 1-5 Tahun

Umur (Tahun)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
	Tinggi Badan (cm)						
1	66.3	68.9	71.4	74.0	76.6	79.2	81.7
2	76.0	79.3	82.5	85.7	88.9	92.9	95.4
3	83.6	87.4	91.2	95.1	98.9	102.7	106.5
4	89.8	94.1	98.8	102.7	107.0	111.3	115.7
5	95.2	99.9	104.7	109.4	114.2	118.9	123.7

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Standar Antropometri Anak, diolah Mei 2024

Selanjutnya pada tabel panjang atau tinggi badan anak perempuan diatas yang sudah disesuaikan berdasarkan ukuran tinggi badan centimeter (cm), jika Panjang atau tinggi badan anak perempuan pada tabel diatas yang sudah disesuaikan dalam ukuran centimeter (cm) kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan kurang dari -3 SD (sangat pendek/*severely stunted*), maka anak tersebut mengalami stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Stunting memiliki dampak buruk bagi tumbuh kembang anak contohnya saja dapat menimbulkan kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak dapat maksimal, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit selain itu anak akan lebih rentan atau berisiko tinggi terhadap penyakit-

penyakit berat. Sehingga stunting sangat berdampak buruk pada masa depan anak yang mengalaminya, bahkan stunting ini merupakan permasalahan gizi yang menjadi isu global karena menyangkut kualitas sumber daya manusia pada suatu negara di masa yang akan datang.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi stunting ditunjukkan pertama kali dengan keikutsertaannya dalam gerakan *Global Scaling Up Nutrition* (SUN) pada tahun 2011. Gerakan ini memiliki prinsip bahwasannya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi.

Pada tataran kebijakan, pencegahan stunting diatur dalam beberapa model peraturan, yakni pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 141, 142, dan 143 yang menjelaskan :

“Bahwasannya perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan. (UU No.36 Tahun 2009, pasal 141,142,143)”.

Selain itu pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan *global Scaling Up*

Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dikarenakan Peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara baik sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, selain itu permasalahan stunting ini merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia saat ini yang ditargetkan turun sebesar 14 persen pada tahun 2024, sehingga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ini sebagai strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Intervensi spesifik dilakukan secara langsung oleh sektor kesehatan dalam bentuk pemberian makanan tambahan, penyediaan vitamin, dan sebagainya, sedangkan intervensi sensitif dilakukan oleh sektor non-kesehatan seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024

“Bahwa upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu dari proyek prioritas. Pemerintah mengagendakan penurunan angka stunting dan menetapkan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional dengan menyusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di tahun 2018- 2024. (Pepres No.18 Tahun 2020).”

Upaya penurunan stunting telah menjadi fokus utama pemerintah, yang mengidentifikasinya sebagai salah satu proyek prioritas nasional. Dengan menetapkan pencegahan stunting sebagai program prioritas, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) untuk periode 2018-2024. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Pepres No. 18 Tahun 2020, mencerminkan komitmen untuk mengurangi prevalensi stunting secara signifikan dengan pendekatan terencana dan sistematis.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak serius stunting terhadap kesehatan dan perkembangan anak, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengidentifikasi stunting sebagai prioritas nasional, berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Berikut adalah ringkasan dari inisiatif dan kebijakan yang telah diluncurkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Lalu berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 stunting di Kabupaten Tangerang berada diangka 23,2% dan ini masih di atas batas ambang yaitu kurang dari 20% yang ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Strategi yang akan dilakukan dalam kebijakan ini adalah strategi pendekatan kemandirian keluarga, pemberian edukasi pelatihan, penyuluhan gizi, penelitian, dan pengembangan gizi.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang sudah mengalami penurunan menjadi 18,4%, artinya angka prevalensi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 yang berada diatas batas ambang yang ditetapkan oleh WHO yaitu kurang dari 20%.

Gambar berikut memberikan rincian mengenai data prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2019. Setelah penurunan prevalensi menjadi 18,4% sebagaimana dilaporkan dalam Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), gambar ini akan menunjukkan distribusi prevalensi stunting di berbagai kecamatan atau daerah dalam Kabupaten Tangerang. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih mendetail tentang sebaran stunting di tingkat lokal, serta untuk memantau kemajuan dan efektivitas upaya penanggulangan masalah gizi di wilayah tersebut.

Gambar ini menyajikan data prevalensi stunting di berbagai kecamatan atau daerah dalam Kabupaten Tangerang untuk tahun 2019. Dengan prevalensi stunting yang telah menurun menjadi 18,4%, tabel ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai distribusi stunting di tingkat lokal. Analisis data ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang lebih tinggi dan mengevaluasi efektivitas intervensi gizi yang telah diterapkan. Informasi ini penting untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam mengurangi stunting lebih lanjut dan memastikan distribusi bantuan gizi yang tepat di wilayah yang membutuhkan.

Gambar 1. 1
Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Banten Menurut Kabupaten/ Kota
Tahun 2021



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021

Namun dapat dilihat pada gambar 1.3 menunjukan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang meningkat menjadi 23,3%. Angka prevalensi tersebut kembali naik seperti di tahun 2018 yang berada di atas batas ambang yang telah ditetapkan oleh WHO yakni sebesar 20%. Selain itu berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Kabupaten Tangerang juga menjadi wilayah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di antara wilayah Tangerang Raya, bahkan hampir tidak jauh angkanya dengan prevalensi stunting di Provinsi Banten.

Menurut Saadatuddaren pada tahun 2021 ia menjelaskan bahwa.

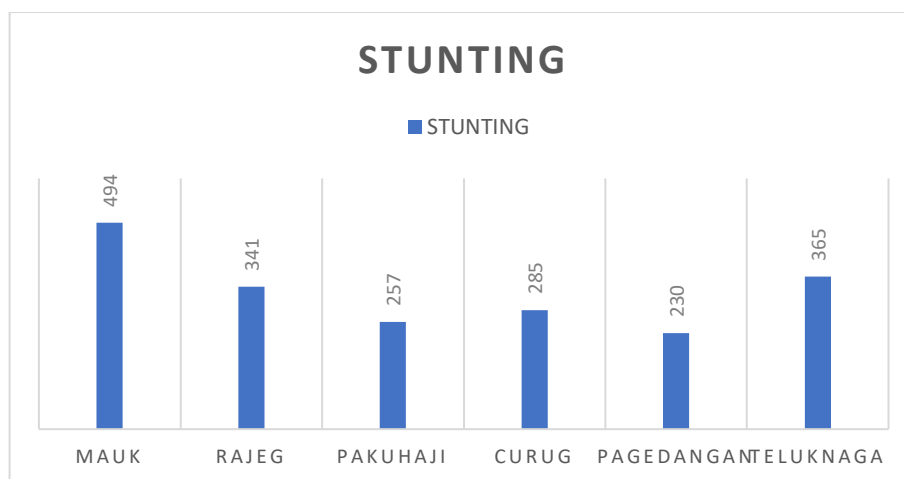
“Tingginya kejadian stunting di suatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sebab faktor non Kesehatan seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga berpengaruh 70% dalam menambah angka stunting (Saadatuddaraen, 2021).

Data berikut menguraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi prevalensi stunting, dengan penekanan pada peran faktor ekonomi dan non-kesehatan. Tabel ini menyajikan informasi yang relevan tentang kontribusi berbagai elemen seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, serta kondisi ekonomi keluarga terhadap angka stunting di daerah tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dan berkontribusi pada masalah stunting, serta untuk membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif.

Gambar data berikut menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting, dengan fokus pada pengaruh faktor ekonomi dan non-kesehatan. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, faktor-faktor seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, dan kondisi ekonomi keluarga memainkan peran signifikan dalam menentukan angka stunting, dengan kontribusi sekitar 70%. Gambar ini menyajikan data yang lebih rinci tentang bagaimana masing-masing faktor tersebut berinteraksi dan berkontribusi terhadap prevalensi stunting di wilayah yang diteliti.

Gambar data ini memberikan visualisasi tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi dan non-kesehatan terhadap prevalensi stunting. Dengan melihat data ini, kita dapat memahami lebih jelas bagaimana aspek-aspek seperti akses terhadap air bersih, pola asuh, pengetahuan ibu, dan kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi angka stunting. Interpretasi dari gambar ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus dan merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah stunting secara menyeluruh.

Gambar 1. 2
Angka Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2022



Sumber : <https://opendata.tangerangkab.go.id/sebaran-balita-stunting-kabupaten-tangerang>

Berdasarkan data yang telah diperoleh, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mencapai 17.983 jiwa. Angka ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Selain itu, angka stunting di Kecamatan Pakuhaji pada tahun 2022 tercatat sebanyak 257 jiwa, yang menunjukkan prevalensi stunting yang sangat tinggi pada tahun tersebut. Data ini menggarisbawahi adanya tantangan signifikan yang dihadapi oleh Kecamatan Pakuhaji dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan gizi, serta menekankan perlunya intervensi yang baik dan terencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara menyeluruh.

Dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menunjukkan beberapa isu kritis yang memerlukan perhatian mendalam. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kecamatan Pakuhaji mencapai 17.983 jiwa,

menjadikannya sebagai kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Tangerang. Selain itu, situasi semakin diperburuk oleh masalah stunting, di mana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 257 jiwa mengalami kondisi stunting yang menunjukkan prevalensi yang sangat tinggi.

Kondisi ini menggaris bawahi perlunya strategi yang baik dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah tersebut. Mengingat pentingnya hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pemerintah Gebrak Tegas dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pakuhaji. Dengan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan program tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang baik untuk mengurangi kemiskinan dan stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan khususnya kepada Pemerintah Kecamatan Pakuhaji, guna meningkatkan efektivitas program-program yang ada dan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Pasalnya faktor ekonomi dan sosial keluarga dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga sangat berpengaruh dalam menimbulkan kejadian *stunting*, seperti penelitian terdahulu terkait faktor yang paling dominan terhadap kejadian stunting di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Penelitian menunjukan dengan adanya kejadian *stunting* pada balita di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, faktor yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada balita di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang adalah

ibu hamil pada saat usia yang berisiko disaat organ reproduksi belum matang secara sempurna yakni, pada usia kurang dari 20 tahun yang disebabkan oleh pernikahan dini.

Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda saat ini juga berdampak pada meningkatnya angka *stunting* di Kabupaten Tangerang, pandemi Covid-19 berdampak pada banyaknya para orang tua yang kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan dalam memenuhi makanan bergizi, serta terganggunya pelayanan kesehatan gizi yang dapat mengakibatkan meningkatnya kembali angka *stunting*. Pandemi Covid -19 juga menjadi hambatan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan *stunting*. Pelaksanaan kegiatan, proses perencanaan dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Tangerang terhambat akibat dampak dari pandemi Covid-19 (Web Terpadu Kabupaten Tangerang, 2021). Oleh karena itu kondisi pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam upaya mencegah *stunting*.

Kemiskinan extreme merupakan suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang esensial, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Kondisi ini merujuk pada situasi di mana seseorang atau sebuah keluarga hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional seperti Bank Dunia.

Dalam konteks ini, kemiskinan *extreme* tidak hanya mencakup kekurangan dalam hal pendapatan, tetapi juga mencakup kekurangan aset yang esensial untuk menjamin kualitas hidup yang memadai. Artinya, pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta perawatan kesehatan yang diperlukan.

Kondisi kemiskinan *extreme* sering kali mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan keluarga, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kemiskinan ekstrem dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi kondisi ini sangat penting untuk merancang intervensi yang baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan *extreme* bisa menjadi konsekuensi dari berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendapatan, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, konflik bersenjata, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan *extreme* melalui berbagai program dan kebijakan, seperti bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, serta upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan *extreme*.

Salah satu Pembangunan ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat ini menurut Ayu pada tahun 2004. “Yaitu dengan adanya pengoptimalan produk unggulan wilayah dan hal ini dapat menjadi salah satu Solusi dalam pengentasan kemiskinan (Ayu, 2004).”

Untuk lebih memahami dampak dari pengoptimalan produk unggulan wilayah dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, berikut ini disajikan data dan informasi yang mendukung pernyataan tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengembangan produk unggulan dapat diimplementasikan secara efektif dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Analisis berikut akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi ini dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Gambar berikut menyajikan data mengenai persentase penduduk miskin di Kabupaten Tangerang, Banten, serta tingkat nasional dari tahun 2013 hingga 2019. Data ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang perubahan prevalensi kemiskinan selama periode tersebut, serta perbandingan antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, dan secara nasional. Gambar ini akan membantu dalam memahami tren kemiskinan dan mengidentifikasi pola-pola penting yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan.

Gambar ini menunjukkan fluktuasi dalam persentase penduduk miskin di Kabupaten Tangerang, Banten, dan tingkat nasional dari tahun 2013 hingga 2019.

Dengan membandingkan data tersebut, kita dapat mengevaluasi kemajuan atau penurunan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Analisis dari data ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan serta membantu dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan di masa depan.

Gambar 1. 3
Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional
Tahun 2013-2019



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2019

Berdasarkan data Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2013-2019 diatas menunjukkan fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2019 presentae penduduk miskin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Banten. Pandemi Covid-19 yang melanda juga menimbulkan peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakangan, warga miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan.

Sebesar 7,12 persen atau sekitar 272.000 penduduk masuk dalam kategori miskin. Sejalan dengan data BPS hasil susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada tahun 2021 menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten Tangerang meningkat 0,89 persen hampir 1 persen atau meningkat menjadi 7,12 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,23 persen.

Kemiskinan *extreme* dan stunting memiliki hubungan yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Kemiskinan ekstrem sering kali menjadi penyebab langsung dari kondisi gizi buruk yang dapat mengakibatkan stunting pada anak-anak. Gizi buruk yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kesehatan dan kemampuan mereka untuk berkembang secara optimal. Stunting, atau kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang terhambat, tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak pada masa kini tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan.

Sebaliknya, stunting dapat memperburuk kondisi kemiskinan dengan mengurangi produktivitas dan kemampuan individu untuk memperoleh pendapatan yang memadai di masa dewasa. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterampilan kognitif dan fisik yang lebih rendah, yang dapat membatasi peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi di masa depan. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, di mana kemiskinan yang berkepanjangan mengarah pada masalah gizi, dan stunting memperparah kemiskinan dengan mengurangi potensi ekonomi individu. Dengan menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam pemberdayaan

masyarakat, diharapkan kemiskinan ekstrem dan stunting dapat dikurangi secara signifikan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks kompleksitas hubungan antara kemiskinan ekstrem dan stunting, penting untuk merumuskan strategi yang baik dan berkelanjutan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Meskipun pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh telah diidentifikasi sebagai solusi potensial, implementasinya memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara berbagai pihak.

Proses ini melibatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif yang diambil dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap strategi yang ada, serta identifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program-program tersebut, menjadi langkah krusial.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai efektivitas program-program yang diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dengan fokus pada program Gebrak Tegas dan upaya pemberdayaan yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan temuan-temuan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting, serta untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui analisis yang

komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dan terencana guna mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan di masyarakat.

Gambar berikut menyajikan data mengenai sebaran keluarga miskin di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2020. Informasi ini memberikan wawasan tentang distribusi keluarga yang menghadapi kemiskinan di berbagai kecamatan atau wilayah dalam kabupaten tersebut. Dengan memvisualisasikan data ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai area-area dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan memprioritaskan upaya intervensi yang diperlukan.

Gambar ini menunjukkan sebaran keluarga miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, memperlihatkan perbedaan tingkat kemiskinan di berbagai kecamatan atau wilayah. Analisis dari data ini akan membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah dengan konsentrasi keluarga miskin yang lebih tinggi dan memahami pola distribusi kemiskinan di tingkat lokal. Informasi ini sangat penting untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Berikut adalah Data Sebaran Keluarga Miskin Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2020

Gambar 1. 4
Sebaran Keluarga Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2020



Sumber : <https://images.app.goo.gl/yx4n2LaDP1vJFLWB9>

Kabupaten Tangerang, yang merupakan bagian dari Provinsi Banten, memiliki populasi sebesar 2.619.803 jiwa dan terdiri dari 30 kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Pakuhaji menonjol sebagai salah satu yang menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan. Berdasarkan data yang tersedia, Kecamatan Pakuhaji mencatat angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020.

Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pakuhaji mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Angka kemiskinan yang tinggi ini menjadi indikator penting dalam menilai kebutuhan intervensi yang mendalam dan strategi pengentasan kemiskinan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi berbagai program yang diterapkan untuk mengatasi kemiskinan di wilayah ini dan

mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pakuhaji.

Sehingga berdasarkan data dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya pencegahan stunting dan kemiskinan *extreme*. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan *Extrem* dan *Stunting* (Gebrak Tegas) Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah Gebrak Tegas yang dilaksanakan di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting dilihat dari variabel, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*), Memberikan perlindungan (*Protecting*)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bermaksud dengan adanya penelitian ini diharapkan program pemerintahan mengenai gebrak tegas di kabupaten Tangerang Kecamatan Pakuhaji dapat berjalan selalu agar mengurangi adanya kemiskinan *extrem* dan juga masalah *stunting* di masyarakat sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan bagaimana Penciptaan Iklim yang memungkinan masyarakat berkembang (*enabling*) terhadap Program pemerintah Gebrak Tegas yang dilaksanakan di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
2. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*) pada Pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Atasi Kemiskinan Extreme dan Stunting (Gebrak Tegas) di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan Perlindungan (*protecting*) pada Pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Atasi Kemiskinan Extreme dan Stunting (Gebrak Tegas) di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

1.4 Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan dilakukan nya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang kurang nya bagi:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Atasi Kemiskinan Extreme dan Stunting (Gebrak Tegas) di kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman, sebagai bekal untuk menjalankan tugas dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang secara umum, dan bagi Pemerintah Kecamatan Pakuhaji secara khusus, dalam pelaksanaan program Gebrak Tegas serta upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dengan temuan-temuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, serta dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.